

## **Analisis belanja daerah menurut urusan dan hubungannya terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi**

**Danal Al Ahlul Naza\*; Selamat Rahmadi; Rosmeli**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*\*E - mail korespondensi: danalnaza12@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze: 1). The dynamics of regional expenditure development according to functions, namely mandatory and optional functions as well as the number of unemployed people in Jambi Province during the period 2008 - 2018, 2). Allocation of regional expenditure to regional expenditure according to mandatory and optional functions in Jambi Province during the period 2008 - 2018 and 3). The relationship between regional expenditure according to mandatory functions and optional functions to the number of unemployed people in Jambi Province during the period 2008-2018. The data analysis method used in this study was the Pearson development, ratio, and correlation formulas. Based on the results of research during the years 2010-2018, the results are regional expenditure according to mandatory functions, regional expenditure according to selected functions, and the number of unemployed in Jambi Province has increased on average. The allocation of regional expenditures according to mandatory functions and regional expenditures according to selected functions in Jambi Province has increased on average. Expenditures according to mandatory functions and expenditures according to selected functions have a very strong and negative relationship to the number of unemployed in Jambi Province during 2010-2018 at  $\alpha = 1\%$  two-tailed (2-tailed) test.*

---

**Keywords:** *Obligatory affairs, regional spending according to selected functions, the number of unemployed*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1). Dinamika perkembangan belanja daerah menurut urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan serta jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008 – 2018, 2). Alokasi belanja daerah pada belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008 – 2018 dan 3). Hubungan belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus perkembangan, rasio dan korelasi Pearson. Berdasarkan hasil penelitian selama tahun 2010-2018 diperoleh hasil : belanja daerah menurut urusan wajib, belanja daerah menurut urusan pilihan dan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi rata-rata mengalami peningkatan. Alokasi belanja daerah menurut urusan wajib dan belanja daerah menurut urusan pilihan di Provinsi Jambi rata-rata mengalami peningkatan. Belanja menurut urusan wajib dan belanja menurut urusan pilihan memiliki hubungan negatif dan sangat kuat terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2010-2018 pada  $\alpha = 1\%$  uji dua arah (2-tailed).

---

**Kata kunci:** *Urusan wajib, belanja daerah menurut urusan pilihan, jumlah pengangguran*

## PEDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara atau daerah pada hakekatnya membawa perubahan dalam kehidupan masyarakatnya atau kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan, jika pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran atau indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara atau daerah. (Kuncoro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara atau daerah pada dasarnya adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat dicapai suatu negara atau daerah akan berdampak sangat luas dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu menghasilkan barang dan jasa (produktivitas) yang tinggi. Keberhasilan menghasilkan barang dan jasa tersebut akan mendorong meningkatnya kemampuan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. (Todaro dan Smith, 2006). Tingginya tingkat pengangguran suatu negara atau daerah bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kurang berhasilnya pembangunan dan tidak meratanya pembangunan. (Todaro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat dicapai suatu negara atau daerah akan berdampak sangat luas dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu menghasilkan barang dan jasa (produktivitas) yang tinggi. Keberhasilan menghasilkan barang dan jasa tersebut akan mendorong meningkatnya kemampuan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut (Mankiew, 2000 dalam Widiastuti, 2010) Kemampuan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan memberi dampak pada peningkatan pendapatan atau penghasilan, kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengurangi pengangguran.

Pentingnya upaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan belanja daerah yang dilakukan oleh setiap daerah. Ketersediaan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan, diharapkan dapat menjamin terlaksananya pelaksanaan pembangunan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

Penyediaan fasilitas yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan alokasi dan menurut urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah menurut urusan pemerintahan di Provinsi Jambi terus diupayakan peningkatannya setiap tahun seiring dengan meningkatnya kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan. Selama tahun 2014-2018, total belanja menurut urusan pemerintahan di Provinsi Jambi rata-rata meningkat 7,71 persen, yaitu dari Rp. 3.204.632.835.005,90 pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp. 4.198.255.718.275,31 pada tahun 2018. Total belanja menurut urusan pada tahun 2014 di Provinsi Jambi naik sebesar 8,47 persen dibanding total belanja pada tahun 2013. Total belanja menurut urusan meningkat kembali di tahun 2015 yaitu naik sebesar 6,90 persen dengan nilai belanja daerah Rp. 3.425.751.341.964,74. Pada tahun 2017 dan pada tahun 2018, total belanja menurut urusan kembali meningkat masing-masing sebesar 25,45 persen dan 1,58 persen dengan nilai belanja pada masing-masing tahun adalah Rp. 4.132.941.881.087,37 dan Rp. 4.198.255.718.275,31.

Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2014-2018, rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,02 persen yaitu dari berjumlah 79.784 jiwa di tahun

2014 dan menurun menjadi 69.075 jiwa pada tahun 2018. Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada tahun terjadi peningkatan sebesar 13,39 persen ditahun 2014 dibanding tahun 2013. Jumlah pengangguran pada tahun 2014 adalah 79.784 jiwa. Jumlah pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing turun sebesar 11,84 persen, 3,79 persen dan 1,26 persen atau dengan jumlah pengangguran tiap-tiap tahun adalah 70.340 jiwa, 67.671 jiwa dan 66.816. sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 3,38 persen.

Berdasarkan data dan kondisi diatas menunjukkan, bahwa total belanja daerah menurut urusan di Provinsi Jambi selama tahun 2014-2018 terjadi peningkatan. Peningkatan yang terjadi ternyata diikuti dengan menurunnya jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Kondisi ini juga memperlihatkan, bahwa belanja daerah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi sesungguhnya mampu menurunkan jumlah pengangguran. Penurunan jumlah pengangguran yang terjadi tersebut apakah ada hubungannya dengan belanja daerah menurut urusan wajib ataukah menurut urusan pilihan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis dinamika perkembangan belanja daerah, alokasi belanja daerah pada belanja daerah, hubungan belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008-2018.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif yaitu menggunakan metode korelasi Product Moment. Adapun rumusnya sebagai berikut : Sugiyono (2012) :

$$PPDP_t = \frac{PDP_t - PDP_{t-1}}{PDP_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

PPDP<sub>t</sub> = Persentase perkembangan belanja daerah menurut urusan wajib, menurut urusan pilihan dan jumlah pengangguran tahun tertentu.

PDP<sub>t</sub> = Relasisai belanja daerah menurut urusan wajib, menurut urusan pilihan dan jumlah pengangguran tahun tertentu.

PPDP<sub>t-1</sub> = Relasisai belanja daerah menurut urusan wajib, menurut urusan pilihan dan jumlah pengangguran tahun sebelumnya.

Rumus rasio digunakan untuk mengukur besarnya alokasi belanja daerah pada belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008-2018. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : (Wahyuni, 2011).

$$KSPDit = \frac{PSPDt}{TPPDt} \times 100 \%$$

Keterangan :

KSPDit = Persentase rasio belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan tahun tertentu.

PSPDt = Realisasi belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan tahun tertentu.

TPPDit = Realisasi total belanja daerah tahun tertentu.

Rumus hubungan belanja daerah menurut urusan wajib terhadap jumlah pengangguran:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

- r = Koefisien kolerasi belanja daerah menurut urusan wajib terhadap jumlah pengangguran.
- n = Lamanya tahun penelitian.
- X = Realisasi belanja daerah menurut urusan wajib.
- Y = Jumlah pengangguran.

Rumus hubungan belanja daerah menurut urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

- r = Koefisien kolerasi belanja daerah menurut urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran.
- n = Lamanya tahun penelitian.
- X = Realisasi belanja daerah menurut urusan pilihan.
- Y = Jumlah pengangguran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika perkembangan belanja daerah menurut urusan wajib

Berdasarkan tabel 3.1, perkembangan belanja daerah menurut urusan wajib di Provinsi Jambi selama tahun 2008 – 2018 bersifat berfluktuatif, dimana rata-rata mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 7,03 persen. Belanja daerah menurut urusan wajib meningkat dari berjumlah Rp. 1.273.868.567.892,50 pada tahun 2008 naik menjadi Rp. 2.357.174.208.777,25 di tahun 2018. Belanja menurut urusan wajib di Provinsi Jambi mengalami peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu naik sebesar 48,06 persen dengan nilai belanja adalah Rp. 2.399.318.966.765,46 dan yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu turun 23,02 persen dengan nilai belanja Rp. 2.360.288.657.526,03. Peningkatan dan penurunan yang terjadi sebagai akibat adanya peningkatan dan penurunan pada belanja yang dilakukan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas di Provinsi Jambi terkait dengan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

**Tabel 1.** Perkembangan belanja daerah menurut urusan wajib Provinsi Jambi

Tahun	Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib	Perkembangan (%)
2008	1.273.868.567.892,50	-
2009	1.326.482.708.251,26	4,13
2010	1.325.788.704.274,62	-0,05
2011	1.620.454.197.362,33	22,23
2012	2.399.318.966.765,46	48,06
2013	2.723.644.097.228,58	13,52
2014	2.968.319.506.267,90	8,98
2015	3.211.778.450.897,69	8,20
2016	3.065.949.321.321,84	-4,54
2017	2.360.288.657.526,03	-23,02
2018	2.357.174.208.777,25	-0,13
	<b>Rata – Rata</b>	<b>7,03</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi 2008-2018(diolah)

Berdasarkan Tabel 1 Belanja menurut urusan wajib di Provinsi Jambi terjadi peningkatan di tahun 2009, yaitu meningkat sebesar 4,13 persen dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010, besarnya belanja menurut urusan wajib terjadi penurunan sebesar 0,05 persen. Belanja menurut urusan wajib kembali terjadi peningkatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan belanja menurut urusan wajib selama lima (5) tahun yaitu dari tahun 2011-2015, masing-masing meningkat sebesar : 22,23 persen, 48,06 persen, 13,52 persen, 8,98 persen dan 8,20 persen. Setelah tahun 2015 yaitu tahun 2016-2018, belanja menurut urusan terjadi penurunan yaitu masing-masing sebesar : 4,54 persen, 23,02 persen dan 0,13 persen. Bagaimana dinamika perubahan belanja menurut urusan wajib di Provinsi Jambi selma tahun 2008-2018.

### **Dinamika Perkembangan Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan**

Belanja daerah, selain digunakan untuk memenuhi keperluan untuk membiayai belanja yang bersifat urusan wajib di Provinsi Jambi juga digunakan untuk membiayai belanja yang terkait dengan urusan pilihan. Belanja menurut urusan pilihan pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.

**Tabel 2.** Perkembangan Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan Provinsi Jambi Tahun 2008 – 2018

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2008	131.114.915.825,00	-
2009	203.590.484.555,00	55,28
2010	162.341.645.323,00	-20,26
2011	129.787.658.798,00	-20,05
2012	158.760.709.853,00	22,32
2013	230.816.875.171,00	45,39
2014	236.313.328.738,00	2,38
2015	213.972.891.067,05	-9,45
2016	228.535.647.351,00	6,81
2017	1.772.653.223.561,34	675,66
2018	1.841.081.509.498,06	3,86
<b>Rata – Rata</b>		<b>69,27</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi 2019 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 2 pada tahun 2009, belanja menurut urusan pilihan di Provinsi Jambi tercatat meningkat sebesar 55,28 persen. Belanja urusan pilihan terjadi penurunan selain pada tahun 2010, juga terjadi di tahun 2011 dan 2015. Pada dua (2) tahun tersebut masing-masing terjadi penurunan belanja menurut urusan pilihan sebesar 20,05 persen dan 9,45 persen. Belanja menurut urusan pilihan pada tahun 2012 meningkat sebesar 22,32 persen. Peningkatan belanja menurut urusan juga terjadi di tahun 2013 dan 2014 yaitu masing-masing sebesar 45,39 persen dan 2,38 persen. Pada tahun 2013 dan 2014. Belanja daerah menurut urusan pilihan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar 6,81 persen dan 3,86 persen.

### **Dinamika perkembangan jumlah pengangguran**

Sukirno (2010) menjelaskan, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi

belum memperolehnya. Lebih lanjut Sukirno (2000) menjelaskan, seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah atau negara lebih banyak disebabkan jumlah penduduk yang meningkat lebih besar dari pada jumlah kesempatan kerja yang tersedia.(Alam, 2011)

**Tabel 3.** Jumlah pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2008 – 2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengangguran (jiwa)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2008	66.371	-
2009	73.904	11,35
2010	83.278	12,68
2011	60.169	-27,75
2012	47.296	-21,39
2013	70.361	48,77
2014	79.784	13,39
2015	70.340	-11,84
2016	67.671	-3,79
2017	66.816	-1,26
2018	69.075	3,38
<b>Rata – Rata</b>		<b>2,14</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2008 – 2018 berdasarkan usia 15 tahun keatas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana rata-rata meningkat sebesar 2,14 persen pertahun. Jumlah pengangguran selama tahun 2008-2018 meningkat dari 66.371 jiwa pada tahun 2008 dan naik menjadi 69.075 jiwa pada tahun 2018.

Jumlah pengangguran selama tahun 2008-2018 di Provinsi Jambi yang terjadi peningkatan yang terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu naik sebesar 48,77 persen dengan jumlah pengangguran sebesar 70.361 jiwa. Sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu turun sebesar 27,75 persen dengan jumlah pengangguran sebesar 60.169 jiwa. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran terjadi peningkatan sebesar 11,35 persen dengan jumlah pengangguran adalah 73.904 jiwa dan pada tahun 2010, jumlah pengangguran meningkat lebih besar dibanding peningkatan pada tahun 2009 yaitu meningkat sebesar 12,68 persen dengan jumlah penduduk miskin 83.278 jiwa.

### **Hubungan belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi Periode Tahun 2008-2018**

Pemberian otonomi pada daerah bertujuan agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi memberi arti, bahwa daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menggali sumber keuangannya, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun yang berasal dari bagi hasil dari pemerintah pusat. (Halim, 2004).

Upaya peningkatan penerimaan daerah beserta sumber-sumbernya diharapkan dapat menjamin ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan. Dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan. Penerimaan daerah pada dasarnya digunakan untuk belanja dalam membiayai fasilitas sarana dan prasarana

yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar penerimaan daerah, maka semakin besar dana yang bisa digunakan untuk belanja atau sebaliknya serta menjamin ketersediaan dana bagi pembiayaan pembangunan.

Belanja daerah digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat akan mendorong peningkatan aktivitas dari masyarakat. Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan memperbesar penerimaan daerah melalui sumber-sumbernya. Belanja daerah dilakukan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas yang ada di daerah. Belanja daerah tersebut digunakan untuk belanja daerah yang bersifat wajib dan bersifat pilihan.

Adapun untuk mengetahui bagaimana hubungan antara belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan tersebut terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi digunakan pendekatan korelasi Pearson dengan bantuan program statistik SPSS versi 21.0 sebagai berikut :

**Tabel 4.** Hasil *correlations*

		Belanja urusan wajib	Belanja urusan pilihan	Jumlah pengangguran
Belanja wajib	urusan Pearson	1	.123	-.984**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)		.718	.000
	N	11	11	11
Belanja pilihan	urusan Pearson	.123	1	-.860**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	.718		.001
	N	11	11	11
Jumlah pengangguran	Pearson	-.984**	-.860**	1
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	
	N	11	11	11

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah, 2019

### **Tingkat hubungan belanja menurut urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi**

Belanja daerah menurut urusan pilihan berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2018 pada tingkat kepercayaan 99 % atau pada  $\alpha = 1$  % uji dua arah (2-tailed) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Adapun besarnya tingkat hubungan sebesar  $-0,860$  atau  $-86,0$  % dan memiliki tingkat hubungan sangat kuat. (Sulaiman,2011). Tingkat hubungan ini menunjukkan, jika terjadi peningkatan pada belanja daerah menurut urusan pilihan akan mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Jambi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008 – 2018 mengalami peningkatan rata rata sebesar 7,03 persen dan 69,27 persen. Sementara jumlah pengangguran meningkat rata-rata 2,14 persen. Rata-rata alokasi belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi

selama periode tahun 2008-2018 sebesar 85,25 persen dan 14,75 persen. Belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2008-2018 memiliki hubungan negatif dan sangat kuat terhadap jumlah pengangguran.

### Saran

Belanja daerah menurut urusan wajib dan urusan pilihan terus meningkat dan ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Peningkatan dapat dilakukan dengan memperbesar penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dari penerimaan yang lainnya. Peningkatan penerimaan daerah akan memperbesar dana yang dapat digunakan dalam membiayai belanja daerah melalui belanja urusan wajib dan urusan pilihan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah pengangguran yang meningkat dimasa datang perlu dikurangi. Pengurangan dapat dilakukan dengan memperbesar belanja daerah melalui belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang dilakukan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas dengan lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- A Delis, C Mustika, E Umiyati. (2015). Pengaruh FDI terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia 1993-2013, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10 (1)
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka cipta
- Ayu, Nadia, Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4), 452-469
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Katalog: indeks pembangunan manusia*, Jakarta.
- F Azzahra, PH Prihanto, YV Amzar. (2016). Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi, *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5 (2)
- Halim. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Ekonomika pembangunan*. Erlangga: Jakarta
- Mankiew, Gregory N. (2012). *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)*. Salemba Empat: Jakarta
- Setiyawati dan Hamzah. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran :pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.4(2), 211-228.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sukirno, Sadono. (2010). *Teori pengantar makroekonomi, Edisi Ketiga*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sulaiman, Wahid. (2011). *Statistik non-parametrik : contoh kasus dan pemecahannya dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta
- Todaro Michael dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, P Michael. (2010). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *tentang pemerintahan Daerah*, 2005. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah*, 2005. Sinar Grafika: Jakarta
- Wahyuni, Yuyun. (2011). *Dasar-dasar statistik deskriptif*. Medical Book: Yogyakarta
- Widiastuti, Ari. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di jawa tengah tahun 2004-2008*. Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.